

Paradigma Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Lingkungan

Rachmad Kristiono Dwi Susilo

Dosen Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah
Malang
Email: *rachmad@umm.ac.id*

Awan Setia Dharmawan

Dosen Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah
Malang
Email: *Setiadharmawan@umm.ac.id*

Abstrak

Pariwisata sebagai salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dalam bidang sosial ekonomi. Hal tersebut merupakan tujuan yang telah terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009. Perkembangan tersebut mempengaruhi sektor destinasi pariwisata ternyata menimbulkan permasalahan sosial dan lingkungan yang menuntut adanya model pariwisata yang berkelanjutan. Pariwisata merupakan ilmu multidisiplin, artinya berbagai ilmu lain juga dapat memberikan analisis sesuai dengan fokusnya masing-masing. Salah satunya adalah sosiologi. Sosiologi dalam hal ini dapat memberikan analisis yang sesuai dengan perspektif sosiologi lingkungan dan sosiologi pariwisata yang telah lama menjadi fokus ilmu dalam paradigma sosiologi. Studi pustaka ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kaitan pariwisata dan lingkungan, dampak pariwisata yang tidak berkelanjutan, dan model pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: *Pariwisata, pariwisata berkelanjutan, sosiologi lingkungan, sosiologi pariwisata*

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki banyak kekayaan alam yang menyimpan berbagai potensi untuk dimanfaatkan. Kondisi ini merujuk pada gambaran dan lokasi geografis Indonesia yang memiliki wilayah luas dari Sabang hingga Merauke. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah telah mendapatkan pemanfaat dan pengolahan dalam bentuk ekonomi wisata. Sayangnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi-potensi kekayaan alam ini, sebagian aktor manusia mementingkan ego (*self interest*), menciptakan relasi yang tidak seimbang antara manusia dengan alam sehingga memunculkan risiko sosial, ekonomi dan lingkungan.

Banyak aktivitas ekonomi wisata yang mengancam kekayaan alam Indonesia, seperti kasus Masyarakat Pantai Paser Panjang dan Pantai Paser Pendek di Kecamatan Sijuk yang tidak

mengizinkan penggunaan kapal isap (Siburian dan John Haba, 2016; 35) demi kelestarian lingkungan *mangrove*. Meskipun pemanfaatan mangrove untuk tujuan pariwisata belum dilakukan, banyak pihak yang menyayangkan atas rendahnya kreatifitas di Belitung karena sesungguhnya tingkat kunjungan wisata ke Belitung sudah meningkat (Siburian dan John Haba, 2016; 107). Penelitian-penelitian sosiologis untuk masalah lingkungan seperti ini diperlukan untuk memberi solusi dan sekaligus mendesain wisata berkelanjutan. Peran sosiologi dalam tulisan ini adalah memberi masukan terhadap pengelolaan pariwisata dan lingkungan karena pembangunan pariwisata rentan memunculkan risiko sosial, ekonomi dan lingkungan.

Kondisi ideal dari pengembangan pariwisata seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Kepariwisata adalah sebagai berikut; a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi, b. meningkatkan kesejahteraan rakyat, c. menghapus kemiskinan, d. mengatasi pengangguran, e. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, f. memajukan kebudayaan, g. mengangkat citra bangsa, h. memupuk rasa cinta tanah air, i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar bangsa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, 2009).

Oleh karena itu konsep kepariwisataan berkelanjutan perlu mendapatkan pengayaan teoretis dan empiris. Saat ini pengembangan pariwisata masih berada dalam jebakan pendekatan pertumbuhan ekonomi semata. Kepentingan dasar pendekatan pertumbuhan ekonomi adalah cara meraih keuntungan tanpa perhatian terhadap aspek kebudayaan dan lingkungan. Pariwisata dilihat dari jumlah wisatawan dan pengeluaran uang. Paradigma lama mengenai kepariwisataan ini cenderung mengeksploitasi alam, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Energi. Kualitas interaksi pengunjung dengan masyarakat penerima pengunjung juga menjadi salah satu poin. Selain itu, paradigma baru akan kepariwisataan harus melakukan pelestarian lingkungan dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan (Ardana, 2019).

Tulisan ini akan menjawab bagaimana pandangan sosiologi dalam analisis terhadap pengembangan pariwisata. Bagaimana kaitan pariwisata dengan sosiologi lingkungan? Selain itu menganalisis bagaimana paradigma pariwisata berkelanjutan dan peran sosiolog dalam menciptakan kondisi ini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka di mana teknik-teknik pengumpulan data

berasal dari penelaahan terhadap buku-buku, jurnal-jurnal, catatan, laporan hingga literatur-literatur lainnya. Penelitian dengan studi pustaka ini juga menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang dicari, pengumpulan data yang dilakukan sejak tanggal 20 November 2020 hingga Januari 2021.

Studi pustaka atau yang biasanya juga disebut dengan penelitian kepustakaan ialah sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan berbagai macam data penelitian dengan bantuan berbagai macam material ada di perpustakaan seperti buku, hasil penelitian sejenis, artikel, catatan hingga berbagai macam jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dibahas dan dipecahkan masalahnya. Kegiatan ini perlu dilakukan secara sistematis untuk bisa mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan informasi-informasi yang diperoleh dari data-data yang ada dengan menggunakan teknik atau metode tertentu yang akan berguna untuk mencari jawaban atas permasalahan yang ada. Studi pustaka sendiri juga berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sari, 2020).

3. Hasil Penelitian

3.1 Konsep-Konsep Dasar Pariwisata

Tiga konsep dasar pariwisata yang penulis pandang penting yakni wisata, pariwisata dan kepariwisataan. Untuk itu akan penulis jelaskan satu persatu.

1. Wisata

Wisata berasal dari bahasa lain “*tour*” yang memiliki arti alat untuk membuat lingkaran. Kata “*tour*” dalam bahasa Inggris sendiri memiliki arti perjalanan ke suatu tempat yang nantinya akan kembali ke titik awal, kalimat “*tour*” ini sendiri telah dipakai secara luas setelah abad ke-16 (Pinata dan Diarta, 2009; 33). Wisata sendiri merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

2. Pariwisata

Kata pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta “*Pari*” yang memiliki arti banyak, berkali-kali, berputar-putar. “Wisata” yang memiliki arti perjalanan atau berpergian. Pariwisata sendiri adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan pemerintah

daerah. Pariwisata itu sendiri seringkali dikaitkan dengan perjalanan manusia secara perorangan atau kelompok dengan berbagai tujuan, asalkan bukan mencari nafkah atau menetap (Simanjuntak, dkk, 2017; 8).

3. Kepariwisata

Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

Pembahasan mengenai kepariwisataan ini bersifat multidisiplin, artinya dapat dilihat dengan berbagai perspektif seperti perspektif sejarah yang mementingkan aspek wisata dari masa ke masa, perspektif ekonomi yang mementingkan hal-hal seperti *supply-demand*, devisa, tenaga kerja hingga upah dan gaji. Apabila dilihat dari perspektif sosial maka yang dipentingkan ialah interaksi wisata dan komunitas, dari perspektif produk dan jasa wisata maka yang dipentingkan ialah penciptaan, penawaran dan distribusi. Kepariwisata juga dapat dilihat dengan perspektif geografis yang melihat pada jarak, waktu, batas wilayah dan pergerakan demografis (Judisseno, 2017; 65).

3.2 Sejarah Pariwisata Dunia dan Indonesia

Apabila dilihat dari segi sejarahnya, pariwisata dunia dapat dipetakan menjadi 4 periode. Periode pertama, sebelum masehi di mana orang-orang Mesir dan Yunani terbiasa bepergian, perjalanan yang mereka lakukan sebagai pengembangan infrastruktur transportasi. Periode kedua pada zaman Yunani, perdagangan di Sumeria dan Babilonia (400 Sebelum Masehi) dan pada abad 1 Masehi Bangsa Romawi bepergian untuk menambah pengetahuan, cara hidup, politik dan berniaga. Periode ketiga pada zaman Islam, di mana kaum Sufi, ahli agama, kiai dan para haji bepergian ke Afrika Utara, Semenanjung Gibraltar dan Eropa dan juga ke tanah Jawa.

Periode keempat adalah pada saat revolusi industri di mana Thomas Cook dan Son Ltd (1840), biro wisata pertama di dunia yang melayani daerah Mesir, Italia, Yunani dan Amerika, *American Express Company* (1841). Pada tahun 1991 pariwisata telah dipengaruhi industri angkutan mobil, disusul oleh beragam angkutan moda transportasi lainnya dan tahun 1963 sudah ada perjalanan wisata dengan pesawat.

Pariwisata sendiri mendapatkan inspirasi dari Thomas Cook pada saat peristiwa revolusi

industri. Thomas Cook yang pada saat itu mengajar sekolah mingguan dan pengenalan kitab suci, di mana ia mengikuti kebiasaan meminum anggur dan alkohol pada abad ke-18 dan ke-19. Thomas Cook yang saat itu ingin mengalihkan perhatiannya terhadap alkohol membuat gerakan anti alkohol yang merebak hingga berbagai daerah. Thomas Cook membuat seminar anti alkohol Loughborough yang mengundang 500 peserta, dari hal tersebut ia mendapatkan inspirasi mendirikan agen perjalanan pada tahun 1865.

Sejarah perkembangan pariwisata Indonesia dibagi menjadi 4 periode berdasarkan buku Sunjayadi (2019) yang berjudul *Pariwisata di Hindia-Belanda (1891-1942)*. Pada periode pertama yaitu era kolonialisme, wisatawan dari Eropa telah mengunjungi Indonesia, tamu orang asing fokus pada pemandangan adat dan istiadat Indonesia. Pada tahun 1910-1920, Gubernur Jendral Belanda membentuk *Vereneiging Touristenverkeer* (VTV) yang meniru Jepang, lalu pada tahun 1931 terbit *Guide Book* tentang daerah Banten, Jawa, Bali, Lombok, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Tanah Toraja. Perkembangan pariwisata di Indonesia sempat terhenti pada zaman Jepang karena fasilitas wisata dan transportasi yang dihancurkan oleh Belanda, kepemilikan pindah ke tentara Jepang (Sunjayadi, 2019; 278).

Periode kedua adalah era Orde Lama di mana terdapat pembangunan biro wisata, pada tahun 1953 organisasi perhotelan yang dinamakan Serikat Gabungan Hotel dan *Tourism Indonesia* (SeRGaHTI) berdiri. Periode ketiga adalah era Orde Baru, Pengelolaan wisata dikelola sepenuhnya oleh negara, kebijakan pembangunan kepariwisataan di dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama yang dimulai tahun 1967/1968 dan berakhir pada tahun 1998/1999. Periode keempat, yaitu era Orde Reformasi, ditetapkan sasaran pembangunan pariwisata, yaitu: Kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto Nasional (%), Wisatawan Mancanegara (orang), Wisatawan Nusantara (kunjungan), dan Devisa (triliun rupiah)– (Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2019) (American Journal of Sociology, 2019).

3.3 Studi Sosiologi Pariwisata

Cohen dalam *The Sociology of Tourism: Approaches, Issues, and Findings, Article in Annual Review of Sociology, Hebrew University of Jerusalem* (1984) menjelaskan bahwa ada beberapa perspektif dalam melihat pariwisata, antara lain:

1. Keramahan yang dikomersialisasikan. Pariwisata dilihat dalam konteks keramahan yang

ditawarkan oleh masyarakat sekitar daerah wisata ini sebagai daya tarik tersendiri di mana para wisatawan yang berkunjung juga memperoleh status dan peran sementara dalam masyarakat yang dikunjungi. Perspektif keramahan ini memiliki fungsi untuk menganalisa dinamika hubungan para wisatawan dan penduduk lokal dalam menganalisis konflik antara peran dan institusi dalam berurusan dengan turis.

2. Perjalanan yang demokratis. Perspektif ini menekankan pada komponen orang yang berpergian (*traveler*) dalam peran wisata. Perspektif ini penting dalam transformasi sejarah peran wisata yang memandang bahwa pariwisata tidak hanya dapat dilakukan oleh golongan kelas atas (bangsawan).
3. Pemanfaatan waktu luang secara demokratis. Perspektif ini menekankan pada pandangan bahwa kegiatan wisata bertujuan untuk mengisi waktu luang, atau bebas dari kewajiban. Pendekatan ini menggunakan sudut pandang fungsionalis yang memandang waktu luang sebagai kegiatan rekreasi, variasi perjalanan tradisional secara modern. Wisata sama dengan perjalanan pada masyarakat tradisional yang disebutnya "*sacred journey*" atau perjalanan suci dalam kegiatan ziarah. Dalam hal ini, wisata memiliki motif spiritual bukan untuk bersenang-senang seperti kegiatan wisata pada umumnya. Wisata "*sacred journey*" ini juga memiliki target lokasi yang berada di tempat-tempat suci atau yang dianggap keramat berdasarkan pada tradisi maupun agama yang berkembang di masyarakat.
4. Ekspresi dari tema budaya dasar. Perspektif ini menekankan pada makna kultural yang lebih dalam pariwisata, fokus pembahasannya ada pada pemahaman makna simbolis khusus budaya yang didasarkan pada pandangan wisatawan. Budaya dasar ini melekat pada tingkah laku dan makna simbolis dari wisatawan atas dirinya sendiri. Proses akulturasi, perspektif ini fokus pada sudut pandang tentang bagaimana turisme berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya sehingga penggunaan teori akulturasi dalam kepariwisataan menjadi pokok utamanya. Wisatawan memiliki tuan rumah dan berupaya akulturasi dengan budaya lain, proses akulturasi ini sendiri terjadi ketika para wisatawan mengunjungi lokasi wisata yang berada di luar wilayah dan kultur. Mereka harus mengikuti kultur yang ada selama berwisata dan masyarakat lokal juga harus beradaptasi pada budaya para wisatawan yang berkunjung.
5. Hubungan etnis. Perspektif ini berusaha untuk mengintegrasikan analisis mengenai

wisatawan dan masyarakat lokal dalam hal etnis dan hubungannya. Pendekatan ini merupakan dampak dari produksi seni etnik untuk menggambarkan identitas etnik, produksi seni etnik ini juga digunakan untuk pasaran wisata

6. Bentuk Neo-Kolonialisme. Perspektif ini memiliki fokus pada peranan pariwisata dalam menciptakan ketergantungan antara negara-negara metropolitan yang menghasilkan pariwisata dan penerima pariwisata, negara-negara “pinggiran” yang meniru gaya kolonial imperealisme dalam bentuk dominasinya serta keterbelakangan struktural. Dalam hal ini wisata dilihat sebagai bentuk dari ketergantungan atau dependensi antara negara “pinggiran” dan negara metropolitan (Cohen, 1984).

Holden melalui buku yang berjudul *Tourism Studies and the Social Science* (2005) menumbuhkan pariwisata sebagai komodifikasi semiotik dan kelas sosial wisatawan dan eksklusivitas sosial dan marginalisasi. Komodifikasi dan semiotik bagi Watson dan Kopachevsky (1996), pariwisata pada konteks budaya konsumen kontemporer yang mengembangkan komodifikasi hidup, semiotik menjelaskan manusia yang mencari “diferensiasi”. Diferensiasi sosial melalui pariwisata dapat meliputi tiga variabel, yaitu mereka yang bisa dan tidak bisa berpartisipasi di dalamnya, destinasi yang dipilih orang-orang untuk dikunjungi, dan jenis kegiatan pariwisata yang mereka lakukan selama liburan.

Kelas sosial wisatawan menurut Cohen, wisatawan memiliki kelas sosialnya tersendiri, kelas sosial wisatawan ini terbagi menjadi empat jenis yaitu *Drifter*, *Individual Mass Tourist*, *Organized Mass Tourist* dan *Explorer*. *Drifter* menjelaskan kelas sosial wisatawan ini memiliki kecenderungan untuk mengunjungi wilayah yang sama sekali belum diketahuinya, menjelajahi wilayah wisata baru dengan cara berpergian dengan jumlah kecil. *Individual mass tourist* menunjukkan kelas sosial wisatawan ini biasanya memberikan atau menyerahkan pengaturan perjalanan wisatanya kepada agen perjalanan dan mengunjungi tempat-tempat wisata yang sudah terkenal. *Organized mass tourist*, kelas wisatawan ini biasanya hanya ingin mengunjungi wilayah atau lokasi wisata yang sudah ia kenal dengan pertimbangan berbagai fasilitas yang biasa ia temui disekitar lokasi tempat tinggalnya (Sunjayadi, 2019: 47). *Explorer*, kelas wisatawan yang satu ini lebih suka apabila perjalanan wisatanya telah ia atur sendiri dan tidak menyukai perjalanan wisata yang sudah umum dilakukan (Putra, 2019).

Eksklusivitas sosial dan marginalisasi dalam perkembangannya, pariwisata menghasilkan eksklusivitas dan marginalisasi sosial yang artinya ada perbedaan dan pembatasan akses wisata bagi

beberapa kelompok sosial tertentu, atau akses yang tidak sama terhadap suatu destinasi wisata. Perbedaan ini dapat dilihat dari tempat wisata yang cukup eksklusif di mana masyarakat kelas sosial menengah, sebagai contoh di Kota Batu, Jawa Timur, kebanyakan lokasi destinasi wisata menawarkan harga tiket yang cukup mahal bagi masyarakat lokal disekitarnya, sehingga menyebabkan ketidakmampuan untuk mengunjungi destinasi-destinasi wisata tersebut.

4. Diskusi Hasil Penelitian

4.1 *Kaitan Pariwisata dengan Lingkungan*

Sumber daya alam yang menjadi anugerah bangsa Indonesia dapat dimanfaatkan demi kepentingan kolektif (*common objective*) dalam melanjutkan hidup dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Namun demikian, krisis lingkungan akibat aktivitas ekonomi—industri wisata telah melahirkan kecemasan dari masyarakat, aktivis pemerhati lingkungan, pemerintah hingga para ilmuwan. Kecemasan ini tentunya tidak muncul tanpa sebab, ketakutan tentang hilangnya sumber kehidupan, rusaknya alam, timbulnya bencana alam hingga risiko-risiko jangka panjang lainnya menjadi fokus permasalahan yang perlu diatasi.

Terdapat kaitan erat antara pembangunan industri pariwisata dengan potensi pencemaran lingkungan (Yoety, 2013). Sementara itu (Cole, 2012) dan (Kousis, 2000) memberikan isu-isu penting berupa lingkungan dan sumber daya alam sebagai *tourist attraction* di mana pembahasan mengenai keterkaitan ekosistem baik itu lingkungan fisik, biologi, sosial dan kelangkaan sumber daya alam menjadi fokus utamanya. Risiko-risiko ikutan dalam *risk society* yang membahas mengenai risiko akibat kapitalisasi wisata yang tidak ramah lingkungan dan dampak sosio-ekologis serta budaya yang fokus pada tanggapan hingga partisipasi masyarakat lokal dalam pariwisata juga menjadi isu-isu penting lingkungan.

Pada tahun 1970-an, refleksi mengenai industri pariwisata telah dimulai. Hal ini terjadi karena adanya efek *multiplier* dan kebocoran ekonomi yang lebih tinggi daripada yang telah diperkirakan. Kecenderungan yang ada mirip dengan kritik para ahli teori ketergantungan terhadap modernisasi, dengan begitu banyak antropolog dan sosiolog mulai memberi perhatian khusus pada dampak sosial, kultural dan lingkungan yang diciptakan oleh sektor pariwisata. Ide turisme sebagai ekonomi perkebunan, hubungan antara negara inti dan periferi dan turisme sebagai “*pleasure periphery*” (Turner dan Ash, 1975) juga dimulai pada tahun 1970-an ini.

Pada tahun 1980-an dan 1990-an, paradigma neoliberal menekankan pada pariwisata

sebagai ekspor, pasar dan perdagangan bebas. Selain itu, penjualan aset negara kepada perusahaan swasta dan liberalisasi ekonomi nasional untuk memungkinkan adanya investasi asing juga dilakukan. Paradigma alternatif juga melihat adanya ide-ide baru yang muncul seperti ekowisata dan pariwisata berkelanjutan yang melihat pariwisata dengan pendekatan “*bottom-up*” di mana keterlibatan masyarakat lebih ditekankan.

Perubahan iklim politik dan ekonomi pasca terjadinya Perang Dunia II menandai awal studi dan teori pembangunan, terdapat paradigma pembangunan seperti modernisasi, ketergantungan, neoliberalisasi ekonomi dan teori pembangunan, seperti yang telah dijelaskan tahun 1950-an dan 1960-an menggunakan paradigma modernisasi dan ketergantungan, pada pertengahan tahun 1970-an dan 1980-an serta 1980 hingga 1990-an menggunakan paradigma neoliberalisasi ekonomi dan pembangunan alternatif. Hal ini memunculkan banyak kelompok kepentingan pariwisata yang berskala lokal, nasional dan internasional, grup industri dan non-industri hingga kelompok kepentingan tunggal (Holden, 2005; Mowforth dan Munt, 2015).

4.2 *Dampak Pariwisata Tidak Berkelanjutan*

4.2.1 *Risiko-Risiko Ikutan dalam Risk Society*

Masyarakat modern pada saat ini berkembang secara pesat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Aktor manusia seakan-akan telah mampu mengendalikan alam dan mulai melupakan tradisi maupun ilmu-ilmu pengetahuan masa lalu. Modernisasi yang ada tentunya sangat berpengaruh pada perkembangan dunia pariwisata modern saat ini, adanya alat-alat berat konstruksi yang canggih memungkinkan manusia membangun destinasi wisata modern yang megah namun merusak lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pariwisata modern yang dibangun tanpa mempedulikan lahan resapan air, membuang limbah yang tak diproses terlebih dahulu ke dalam sungai, tidak melakukan pengurusan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), merusak sumber mata air, polusi karbon yang tinggi, menutup akses ekonomi masyarakat dan eksploitasi besar-besaran untuk kepentingan profit.

Risk society akhirnya berkembang seiring dengan modernisasi teknologi tersebut. Banyaknya eksploitasi lingkungan melalui pariwisata menimbulkan kondisi masyarakat yang penuh risiko, selama hal itu terjadi kita tidak akan pernah merasa aman sepenuhnya karena risiko-risiko tersebut akan membawa konsekuensi yang berat (Upe, 2014). Gagasan tentang *risk society* oleh Ulrich Beck memuat gagasan-gagasan penting seperti risiko bisa tidak terlihat

(*invisible*), tidak bisa diubah dan didasarkan pada interpretasi kasual. Risiko juga dapat diproduksi melalui sumber-sumber kekayaan dalam masyarakat industri, risiko dari masyarakat yang mencoba melepaskan tradisi dan pengetahuan masa lalu, risiko tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, risiko dan kelas tidak terpisah (Susilo, 2019; 174-175).

4.2.2 Dampak Sosio-Ekologis dan Budaya

Selain dampak *risk society*, ada juga dampak sosio-ekologis dan budaya yang ditimbulkan sehingga poin ini memiliki fokus bahasan tentang bagaimana tanggapan masyarakat atas *tourism*, perubahan cara hidup dan partisipasi masyarakat lokal. Dalam pengembangan pariwisata, dampak yang harus diperhatikan ialah bagaimana tanggapan masyarakat mengenai *tourism* tersebut. Tanggapan masyarakat lokal sendiri dapat berupa penerimaan, partisipasi hingga penolakan terhadap *tourism*. Apabila pariwisata dinilai merugikan maka masyarakat akan melakukan penolakan hingga gerakan lingkungan, seperti yang terjadi di Sumatera Utara tepatnya di Danau Toba di mana terjadi konflik antara para nelayan dan pihak konstruksi pembangkit listrik tenaga air dalam hal degradasi lingkungan dan konflik penggunaan yang mana penegakan hukum lingkungannya masih lemah (Sampieri, 2012). Dengan berbagai pertimbangan mengenai dampak tersebut, para sosiolog memiliki fungsi dan peran untuk memperkuat *local initiatives*.

Dampak berupa penolakan dan gerakan lingkungan juga tidak hanya terjadi di Indonesia. Kelompok masyarakat di beberapa negara seperti Yunani, Spanyol dan Portugal juga tercatat pernah melakukan gerakan lingkungan melawan kegiatan pariwisata dari awal tahun 1970 hingga 1990-an yang mengkritisi dampak dari pariwisata, keberlanjutan ekosistem lokal dan pembangunan yang berkelanjutan. Aksi penolakan dan gerakan lingkungan yang terjadi dilakukan dalam berbagai macam upaya seperti membuat klaim secara formal, petisi, mengadakan pertemuan, demonstrasi, boikot, penyerangan, pengancaman hingga kekerasan kolektif. Di Yunani gerakan lingkungan dimulai pada tahun 1981 dan terus berlanjut hingga setidaknya selama satu dekade, para aktivis lingkungan di Zakynthos fokus kepada dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas turisme terhadap penyu lokal, gerakan lingkungan ini didukung oleh berbagai pihak termasuk pemerintah, buruh, ilmuwan, beberapa pemilik hotel, media massa, komunitas, hingga kelompok gereja (Kousis, 2000).

Gerakan lingkungan berupa protes atas rencana pembangunan akomodasi turisme dan

pelabuhan olahraga di sebuah pulau kecil bernama Dragonera dilaksanakan antara tahun 1977 dan 1978 di Spanyol. Gerakan ini dipicu oleh ancaman kerusakan ekosistem alam di Pulau Dragonera yang mengancam kehidupan flora dan fauna di sekitaran area tersebut, hingga masyarakat lokal membentuk sebuah regulasi yang bertujuan untuk melindungi pulau tersebut. Awal tahun 1990-an terjadi konflik yang berlangsung selama lebih dari satu tahun yang melibatkan masyarakat pedesaan dari Aldeia de Meco Provinsi Setubal, Portugal. Masyarakat menilai bahwa mengembangkan pariwisata di daerah tersebut akan menimbulkan kerusakan lingkungan terutama pada zona pesisir. Pada tahun 1993-1994 beberapa tindakan protes dilakukan secara terorganisir dengan melakukan tuduhan umum di media massa, pengaduan prosedural kepada otoritas, debat, pengumpulan tanda tangan dan referendum publik (Kousis, 2000).

4.3 Model Pariwisata Berkelanjutan Di Indonesia

Banyak daerah destinasi wisata yang belum menemukan model pariwisata berkelanjutan yang tepat sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti kerusakan ekosistem, pencemaran, bencana alam atau non-alam, penolakan dari masyarakat, konflik kepentingan hingga hilangnya peluang ekonomi masyarakat. Melihat hal tersebut, para sosiolog memiliki peranan untuk memperkuat gerakan konservasi, melakukan evaluasi, analisa resiko dan advokasi sosial. Peranan para sosiolog tidak lain untuk menyelamatkan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat yang sedang berada di dalam tahap kritis. Pengambilan peran untuk memperkuat konservasi gerakan lingkungan yang telah dilakukan oleh masyarakat bertujuan untuk membuat gerakan konservasi tersebut lebih tepat sasaran, memiliki visi misi yang jelas, membuat tujuan konservasi tetap pada jalurnya (*on the track*). Selain itu, memperkuat gerakan konservasi masyarakat ini memungkinkan para sosiolog untuk mempersiapkan landasan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan konservasi yang lebih baik.

Peranan sosiolog juga melakukan evaluasi atas program dan kegiatan kepariwisataan juga dilakukan agar masyarakat mampu melakukan gerakan konservasi, mengetahui kelemahan, kekurangan, kelebihan, hal apa saja yang diperlukan untuk mengembangkan gerakan konservasi itu sendiri hingga merencanakan program selanjutnya. Sosiolog juga mampu melakukan advokasi sosial demi mendukung model pariwisata yang berkelanjutan dalam pembangunannya, para sosiolog di lapangan mempengaruhi hingga mendesak perubahan ke arah yang lebih baik

guna memberikan dukungan dan pembelaan pada korban dari kebijakan yang tidak adil dan tidak berpihak pada lingkungan.

Ardika (2018; 31) menyebutkan bahwa dalam menciptakan dunia kepariwisataan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab diperlukan keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata yang adil dan dapat memberikan banyak manfaat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan penciptaan lapangan kerja. Model pariwisata berkelanjutan dibangun atas dasar urgensi untuk menjaga lingkungan hidup agar mampu memenuhi berbagai kebutuhan generasi sekarang maupun yang akan datang secara adil.

Demi menciptakan model pariwisata berkelanjutan diperlukan implementasi yang menekankan pada poin-poin penting. *Sustainable tourism*, poin ini menjelaskan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan yang digabungkan dengan *co-management* konsep 3P (*people, planet, profit*) dalam pembangunannya. Konsep *triple bottom line (people, planet, profit)* ini pertama kali diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1994 dalam bukunya yang berjudul *Cannibal with Fork* yang dapat menjadi tiga pilar pengukuran kinerja yang dapat dilihat dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan (Felisia, 2014). *Triple bottom line* ini juga menjabarkan konsep *green economy*, yaitu sistem ekonomi yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan secara signifikan mampu mengurangi risiko lingkungan serta kerusakan ekologi melalui efisiensi sumber daya alam, rendah karbon dan kepedulian sosial terhadap sesama manusia (Putra dan Larasdiputra 2020). Pada konteks ini para sosiolog berperan mendampingi, mengevaluasi, mengkritisi aktor-aktor pariwisata dan membuka ruang publik dengan menggunakan paradigma pariwisata dunia.

Tata kelola berkelanjutan, poin ini menjelaskan bagaimana tata kelola berperan menata semua “sumber daya” *stakeholders* seperti *local government*, masyarakat hingga komunitas di mana para sosiolog memiliki fungsi untuk menggambarkan bekerjanya tata kelola ini. Selain itu sosiolog mendesain tata kelola yang efektif, menginventarisir interaksi, persepsi dan perilaku aktor, memperkuat sumber daya aktor, mendesain regulasi dan memastikan bekerjanya modernisasi ekologis. Manajemen pariwisata, poin ini menjelaskan tentang pengelolaan semua *stakeholders* yang terlibat dalam kepariwisataan di mana mampu bekerja secara efektif. Peran sosiolog dalam manajemen ini untuk mencapai tujuan atau target-target *stakeholders* dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia dan dapat dimanfaatkan. Manajemen ini sangat penting untuk mengorganisir jalannya organisasi, gerakan maupun model pengelolaan

lingkungan. Di sini sosiolog berperan mendampingi, mengevaluasi dan mengkritisi aktor-aktor pariwisata, pengembangan *Community Based Tourism*.

Community based tourism pada saat ini hadir sebagai salah satu alternatif model pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan daya tarik wisata alam maupun budaya di mana masyarakat lokal menjadi pelaku utamanya (Hadiwijoyo, 2018). Konsep *community* ini memberi kesempatan masyarakat lokal untuk melakukan kontrol dan keterlibatan secara langsung dalam manajemen pengembangan destinasi wisata demi tercapainya pemerataan akses ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat dan pemberdayaan politik (*capacity building*) dengan tujuan untuk menjadikan masyarakat lokal sebagai pengambil keputusan (Wiwin, 2018). Supaya pelaksanaan *community based tourism* berhasil maka ada empat elemen yang perlu diperhatikan, yakni: sumber daya alam dan budaya, organisasi masyarakat, manajemen dan pembelajaran (Hadiwijoyo, 2018). Oleh karena itu, prinsip-prinsip *community based tourism* mendorong para sosiolog berperan menguatkan individu sebagai subyek, membangun inisiatif lokal, mengonstruksi pengetahuan partisipatif, memperkuat komunitas, memperkuat kearifan lokal dan memaksimalkan peran negara.

Ekowisata sebagai bentuk *Community Based Tourism*. Pada saat ini, ekowisata dipandang menjadi salah satu model pariwisata yang paling mudah dilakukan. Tidak heran jika mulai marak dikembangkan saat ini. Ekowisata sendiri sejatinya melawan paradigma pariwisata lama yang dicirikan sebagai pembangunan besar-besaran, pertumbuhan cepat, eksploitasi sumber daya alam tanpa berfikir kelestarian lingkungan dan adanya marginalisasi terhadap masyarakat lokal. Ekowisata (Fennel, 1999; 43) dapat diartikan sebagai sebuah wisata berbasis alam berkelanjutan dengan menfokuskan pengalaman dan pendidikan mengenai alam yang dikelola sedemikian rupa sehingga menimbulkan dampak negatif yang rendah bagi lingkungan, non-konsumtif dan *local oriented* dalam hal kontrol serta manfaat yang didapatkan dari kegiatan usaha. Menurut *World Conservation Union* (WCU, 1996) ekowisata adalah perjalanan yang bertanggung jawab secara ekologis, mengunjungi tempat yang masih asli (*pristine*) dan mempromosikan konservasi alam (Arida, 2017).

Ekowisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan secara profesional, terlatih dan di dalamnya terdapat unsur-unsur pendidikan. Wisata ini dilihat sebagai sebuah sektor ekonomi yang mempertimbangkan warisan budaya leluhur, partisipasi, kesejahteraan bagi masyarakat lokal dan penyertaan upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan (Nugroho,

2015; 17).

Ekowisata dalam pengembangannya memiliki prinsip yang menghormati tiga hal, yakni partisipasi masyarakat lokal, pro atas lingkungan dan edukasi. Kapitalisasi lingkungan dalam pariwisata yang memiliki tujuan untuk eksploitasi demi keuntungan pribadi semata menjadi masalah besar pada saat ini. Banyak destinasi pariwisata yang belum menemukan model pengelolaan yang tepat sehingga memicu kerusakan lingkungan dan bersifat non konservatif.

5. Kesimpulan

Berkembangnya dunia kepariwisataan membawa dampak terhadap masyarakat maupun lingkungan alam. Pembangunan kepariwisataan awalnya diharapkan memberi kontribusi terhadap perkembangan bidang sosial ekonomi masyarakat lokal dan lingkungan. Adanya celah pada apa yang seharusnya diharapkan terjadi (*das sollen*) dengan kenyataan sebenarnya yang di luar ekspektasi (*das sein*) membawa pada ruang-ruang permasalahan hingga konflik. Ketidaksesuaian antara harapan dan realitas inilah yang saat ini dihadapi oleh perkembangan dunia pariwisata.

Para sosiolog memiliki pandangan bahwa perkembangan pariwisata saat ini belum mampu mencapai kondisi keberlanjutan (*sustainable*) sehingga pariwisata masih menciptakan marginalisasi, eksploitasi alam demi kepentingan para kapitalis, akulturasi budaya, konflik antara masyarakat lokal dengan para wisatawan maupun pihak-pihak yang terlibat. Erik Cohen (1984) menyebut beberapa perspektif dalam melihat pariwisata yaitu keramahan yang dikomersialisasikan, perjalanan yang demokratis, pemanfaatan waktu luang secara demokratis, variasi perjalanan tradisional secara modern, ekspresi dari tema budaya dasar, proses akulturasi, hubungan etnis dan bentuk neo-kolonialisme. Pariwisata telah menciptakan sebuah kelas sosial wisatawan seperti adanya *drifter*, *individual mass tourist*, *organized mass tourist* dan *eksplorer* yang dapat menggambarkan pola perilaku wisatawan.

Pariwisata dalam perspektif sosiologi lingkungan melihat bahwa pariwisata yang ada saat ini dipandang belum bisa memenuhi model pengelolaan yang baik dan berkelanjutan (*sustainable*) sehingga standar keramahan lingkungan yang ada masih rendah. Eksploitasi, industrialisasi dan kapitalisasi terhadap lingkungan adalah sumber krisis lingkungan yang mencemaskan banyak aktor sosial ekonomi. Kecemasan atas hilangnya sumber kehidupan, rusaknya alam, timbulnya bencana alam hingga risiko-risiko jangka panjang lainnya menjadi

fokus permasalahan yang perlu segera diatasi.

Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari interaksi sosial memberikan kontribusi secara konsep dan praksis terhadap keberlangsungan lingkungan. Kontribusi ini diharapkan mampu membantu masyarakat untuk menemukan model pengelolaan pariwisata yang tepat sehingga mampu menuju pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*). Sosiolog memberikan kontribusi berupa penguatan konservasi, praktik evaluasi, analisa risiko, advokasi sosial, memperkuat daya kritis, studi kapitalisme wisata, memperkuat *local initiatives*, dan menggambarkan atau mendesain tata kelola yang efektif, menginventarisir interaksi, persepsi dan perilaku aktor.

DAFTAR PUSTAKA

- American Journal of Sociology. 2019. *Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2019*. (Journal of Chemical Information and Modeling. 53(9), 1689–1699).
- Ardika, I Gede. 2018. *Kepariwisata Berkelanjutan: Rintis Jalan Lewat Komunitas*.
- Arida, I. N. S. 2017. *Ekowisata: Pengembangan, Partisipasi Lokal, dan Tantangan*. In Cakra Press.
- Cohen, E. 1984. *The Sociology of Tourism: Approaches, Issues, and Findings*. (Annual Review of Sociology. Vol. 10, 10(1984), 373–392). <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.10.1.373>
- Felisia, A. L. 2014. *Triple Bottom Line Dan Sustainability*. (Triple Bottom Line dan Sustainability. 18(1), 14–27). <https://doi.org/10.26593/be.v18i1.827.%p>
- Hadiwijoyo. 2018. *Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Suluh Media
- Holden, A. 2005. *Tourism studies and the social sciences*. (In Tourism Studies and the Social Sciences). <https://doi.org/10.4324/9780203502396>
- II, B. 2002. *Wacana Pertambangan dan Praktik Jurnalisme Lingkungan Hidup*. Surat Kabar Lokal Yogyakarta. lim(2009), 1–25.
- Judisseno, Rimsky K. 2017. *Aktivitas dan Kompleksitas Kepariwisata : Suatu Tinjauan Tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kousis, M. 2000. *Tourism and the environment: A social movements perspective*. (Annals of Tourism Research. 27(2), 468–489). [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(99\)00083-3](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00083-3)
- La Planificación Tributaria En Venezuela, 2009(75), 31–47*.
- Mowforth, M., dan Munt, I. 2015. *Tourism and Sustainability Development, Globalisation and New Tourism in the Third World*. (In Tourism and Sustainability). <https://doi.org/10.4324/9781315795348>
- Nugroho, Iwan. 2015. *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pariwisata Budaya, 3(1), 69–75*.
- Pinata, I Gde dan I Ketut Surya Diata. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Putra, D. T. 2019. *Infrastruktur Pendukung Potensi Daya Tarik Wisata Berdasarkan Segmen*

- Wisatawan di Eling Bening Ambarawa Kabupaten Semarang Jawa Tengah.* (Jurnal Gema Wisata. 15(3), 634).
- Putra, I. G. B. N. P., dan Larasdiputra, G. D. 2020. *Penerapan Konsep Triple Bottom Line Accounting Di Desa Wisata Pelaga (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha Tani Asparagus.* (KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi. 11(2), 129–136).
<https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1419.129-136>
- Sampieri, R. H. 2012. *Strategic Plan Sustainable Tourism and Green Jobs for Indonesia.*
- Sari, M. 2020. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA.* (Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA. 6(1), 41–53).
Retrieved
from <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, Flores Tanjung dan Rosramadhana Nasution. 2017. *Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sunjayadi, Achmad. 2019. *Pariwisata di Hindia Belanda (1891-1942).* Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Susilo, Rachmad K. Dwi. 2019. *Sosiologi Lingkungan.* Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 10 Tahun 2009. 2009. *Aspectos Generales De*
- Upe, A. 2014. *Masyarakat Risiko dalam Lingkar Eksploitasi Pertambangan Emas dan Realisasi CSR Di Kabupaten Bombana.* (23-33 . vol 1. no 1).
- Wacana. 2017. *Wacana Ekologi Politis Air: Akses, Eksklusi dan Resistensi.* Yogyakarta: INSISTPress.
- Wiwin, I. W. 2018. *Community Based Tourism Dalam Pengembangan Pariwisata Bali.*
- Yoety, Oka. A. 2013. *Komersialisasi Seni Budaya dalam Pariwisata.* Bandung: CV Angkasa